

**DINAMIKA EKONOMI INDONESIA
DARI MASA KE MASA**

BBZ
KFB
PS.135/10
Zad
d-2



Pidato ilmiah

**diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan guru besar
dalam Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
Surabaya - Kamis, 26 Januari 1995**

oleh

SUROSO IMAM ZADJULI

Yang terhormat,

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga
Saudara Rektor Universitas Airlangga
Saudara Pembantu Rektor Universitas Airlangga
Saudara-saudara Anggota Senat Guru Besar Universitas Airlangga
Saudara Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga
Rekan-rekan Dosen dan Asisten di lingkungan Universitas Airlangga
Para Sivitas Akademika Universitas Airlangga
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu perkenankanlah saya sebagai insan yang lemah memanjatkan puji syukur kehadapan Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama dengan keadaan sehat wal afiat dalam rapat terbuka Senat Universitas Airlangga ini.

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya menyampaikan pidato peresmian jabatan saya yang berjudul :

DINAMIKA EKONOMI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Dalam pidato peresmian jabatan ini, dianalisis secara global dan singkat tentang "Dinamika Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa", yang meliputi :

1. Keadaan Sosio-Ekonomi Hindia Belanda Masa Pra Kemerdekaan
2. Perkembangan Sosio-Ekonomi Indonesia Masa Pasca Kemerdekaan
3. Situasi Sosio-Ekonomi Masa Orde Lama
4. Perkembangan Sosio-Ekonomi Masa Orde Baru

Analisa sejarah tentang perkembangan sosio-ekonomi dari masa ke masa ini dimaksudkan untuk menilai keadaan perubahan tata nilai sosio-ekonomi kemasyarakatan secara kualitatif dan kuantitatif serta untuk mengetahui pula

Perbandingan perkembangan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum dari waktu ke waktu dalam analisis jangka panjang yang dinamis. Dengan analisis jangka panjang yang dinamis tersebut, akan dapat diketahui pula situasi dari hasil usaha pembangunan dari masing-masing pemerintah/birokrat yang berkuasa pada periode yang bersangkutan serta pengaruhnya terhadap tatanan sistem dan kegiatan/aktifitas ekonomi pada umumnya.

Hal ini merupakan penjabaran dari makna pembangunan dalam analisis secara praktis dimana pembangunan pada dasarnya dapat diartikan sebagai pertumbuhan dipimpin yaitu pertumbuhan yang dilaksanakan secara ekonomis dan efisien atau pertumbuhan sejalan dengan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam hal sikap masyarakat, kelembagaan, keadaan produksi dan tingkat kehidupan masyarakat. Biasanya pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan ditambah dengan perubahan sosial. Namun pembangunan dapat diartikan pula sebagai pengaturan terhadap gerakan pertumbuhan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan adalah pertumbuhan terencana, dimana pertumbuhan tersebut direncanakan untuk memaksimumkan tingkat kemakmuran masyarakat sekarang maupun yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan pemikiran D. V. Ramana dimana :

"Development may be understood as organized growth, i.e. growth which is brought about economically and difficulty and growth which associated with desired changes in attitude, institutions, conditions of production and the levels of living of the people. Popularly, development is known as growth plus social change. Development may also be regarded as controlled release of the impulse of growth within the economy through a system of development planning. In other words, development is planned growth. It is growth so planned as to maximise the welfare of community, not only now, but through time".

Hadirin yang saya hormati,

1. KEADAAN SOSIO-EKONOMI HINDIA BELANDA MASA PRA KEMERDEKAAN

Jumlah penduduk Hindia Belanda (Indonesia) pada Sensus tahun 1930 adalah sebanyak 60.727.233 jiwa dan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 20.870.000 pekerja dengan rincian sebesar 67,7 % bekerja di sektor Pertanian, sebesar

0,7 % di sektor Pertambangan & Kerajinan Rakyat, sebesar 6,2 % Transpor & Komunikasi dan sebesar 8,4 % bekerja di Sektor la

Industri yang cukup dominan pada areal tanam tebu pada waktu itu ada juta ton gula setiap tahunnya, sehingga sekaligus eksportir gula yang cukup sekitar 680.000 pekerja, dimana sebagian di sub-sektor industri pembatikan juta ton. Dengan rata-rata besar sekitar 460.000 ton setiap tahun negeri waktu itu adalah berada produksi per kapita beras dalam tahun.

Pada tahun 1938 jumlah per beredar pada saat itu hanya s uang untuk setiap orang adalah tersebut di atas dapat dibayar pada waktu itu. Pengaruh Pe serta depresi dunia tahun 19

1. Lumpuhnya pasaran gula Indonesia di masa Pemerintah Kolonial "leading sector" dalam Politik" ataupun "Pol
2. Hancurnya Industri mempercepat pula jajahan, sehingga daerah jajahan Hin
3. Makin menurunnya Kolonial Belanda

secara umum dari
pat diketahui pula
ntah/birokrat yang
dap tatanan sistim

am analisis secara
agai pertumbuhan
dan efisien atau
n dalam hal sikap
masyarakat.
dengan perubahan
gaturan terhadap
nan. Dengan kata
mbuhan tersebut
yarakat sekarang

which is brought
desired changes
ing of the people.
development may
hin the economy
ment is planned
munity, not only

ERDEKAAN

un 1930 adalah
kerja sebanyak
ertanian, sebesar

0,7 % di sektor Pertambangan & Galian, sebesar 10,6 % bekerja di sektor Industri & Kerajinan Rakyat, sebesar 6,2 % di sektor Perdagangan, sebesar 1,5 % di sektor Transpor & Komunikasi dan sebesar 4,9 % beraktifitas di sektor Jasa-jasa serta sebesar 8,4 % bekerja di Sektor lainnya.

Industri yang cukup dominan pada saat itu adalah industri gula dimana rata-rata areal tanam tebu pada waktu itu adalah sekitar 200.000 Ha. dengan produksi sekitar 3 juta ton gula setiap tahunnya, sehingga menempatkan Indonesia sebagai produsen dan sekaligus eksportir gula yang cukup besar di Dunia. Industri tekstil mempekerjakan sekitar 680.000 pekerja, dimana sebanyak 500.000 pekerja adalah wanita yang bekerja di sub-sektor industri pembatikan. Pada tahun 1930 kebutuhan akan beras sekitar 6,1 juta ton. Dengan rata-rata besarnya impor beras antara tahun 1921-1940 adalah sekitar 460.000 ton setiap tahunnya, maka dapat diperkirakan produksi beras dalam negeri waktu itu adalah berada di sekitar 5.640.000 ton setahun. Dengan demikian produksi per kapita beras dalam negeri pada waktu itu adalah sebanyak 93 kg per tahun.

Pada tahun 1938 jumlah penduduk sebanyak 68,4 juta jiwa dan jumlah uang yang beredar pada saat itu hanya sebesar 300 juta golden, sehingga rata-rata peredaran uang untuk setiap orang adalah sebanyak 4,38 golden saja. Dengan perbandingan tersebut di atas dapat dibayangkan betapa tingginya nilai mata uang Hindia Belanda pada waktu itu. Pengaruh Perang Dunia I dan depresi besar di Amerika tahun 1920 serta depresi dunia tahun 1930 terhadap perekonomian Indonesia waktu itu antara lain

1. Lumpuhnya pasaran dunia pada waktu itu menyebabkan hancurnya pula pasaran gula Indonesia di pasaran Internasional saat itu, sehingga hancur pula harapan Pemerintah Kolonial Belanda yang akan menjadikan industri gula sebagai "leading sector" dalam rangka membangun masyarakat Indonesia lewat "Etise Politik" ataupun "Politik Balas Budi" yang telah diprogramkan sejak tahun 1900.
2. Hancurnya Industri dan fasilitas-fasilitas Perdagangan Belanda, ikut mempercepat pula proses terjadinya stagnasi di bidang perekonomian daerah jajahan, sehingga take off/lepas landas dalam pembangunan perekonomian daerah jajahan Hindia Belanda (Indonesia) tidak dapat direalisasikan.
3. Makin menurunnya upah riil dari kaum buruh/pekerja swasta maupun pegawai Kolonial Belanda, sebab selain telah terjadi inflasi pada waktu itu, juga terdapat

"underpayment" secara umum. Hal ini akibat makin merosotnya persediaan dana yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun swasta/perseorangan karena akibat peperangan yang berlarut-larut.

4. Produksi per kapita pertanian terutama beras juga menjadi merosot, yaitu pada tahun 1900 produksi rata-rata per kapita sebanyak 110 kg per tahun, pada tahun 1940 tinggal sebanyak 85 kg saja.

Hal ini selain disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah penduduk juga terdapatnya pola pergeseran dalam bercocok tanam pada tanaman bahan makan akibat berpindahannya sebagian besar masyarakat dari makan nasi ke bahan makanan ketela/ubi yang harganya relatif lebih murah pada waktu itu. Pada tahun 1900 produksi ubi-ubian per kapita sebanyak 20 kg per tahun telah meningkat menjadi 180 kg pada tahun 1940. Produksi kacang-kacangan juga meningkat dari 3 kg per kapita pada tahun 1900 menjadi 10 kg pada tahun 1940. Namun demikian konsumsi per kapita secara keseluruhan masih belum dapat mencapai target, yaitu masih berada di bawah 2.000 kalori pada periode pertengahan awal abad XX tersebut.

Untuk mengatasi berbagai hal tersebut di atas pemerintah Hindia Belanda mengambil keputusan untuk merubah "sistim ekonomi liberal" menjadi "sistim ekonomi yang lebih reguler", sehingga menjadi tidak bebas lagi karena semakin banyaknya campur tangan Pemerintah di bidang perekonomian.

Kebijaksanaan membangun kembali perekonomian Hindia Belanda setelah perang tersebut lebih terkenal dengan istilah politik membalas budi (etise politik); dimana kebijaksanaan itu timbul, juga karena tantangan kritik dari para cendekiawan Belanda sendiri, di antaranya J.H. Bocke dengan teorinya "The Theory of Cultural Dualism".

Dalam teori tersebut pada garis besarnya dikatakan bahwa hasil yang spektakuler dari masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad di Indonesia adalah terdapatnya perbedaan yang mencolok dalam hal keadaan ataupun sistim struktur sosial dan perekonomian antar golongan Pribumi dan golongan Barat termasuk di dalamnya golongan Timur Asing yang dipersamakan. Dualisme disini dapat dilihat pada keadaan pendidikan, lapangan pekerjaan, tingkat kemakmuran, perlakuan hukum, tatacara perlakuan terhadap masyarakat dan lain sebagainya, dimana pada pihak Pribumi selalu diperlakukan dalam keadaan yang lemah dan menyedihkan.

Dari pihak negara
tuk mengadakan mes
daerah jajahannya
pada tahun 1907 di
di Jawa dan selebih
Dengan adanya etise
1.656.244 orang, se
orang mahasiswa
pelajar dan mahasiswa
dari seluruh jumi
ini akan sangat mem

Perlu dicatat
sebanyak f 2.700.0
maka GNP per ka
National Hindia B
meliputi sebesar
sektor Perdagangan
serta sebesar 25,7

Dalam masa p
nesia semakin m
jajahan yang dip
itu. Tidak bedany
dan tanam paksa,
yang juga banyak
Singapura dan lai
kapal peninggalan
perang yang ber
Jepang waktu it
bercelana karung
terhadap nilai u
tiap sen mata u
sehari, maka uat

Dari pihak negara sekutu Belanda sendiri juga menekan pemerintah Belanda untuk mengadakan restorasi serta memberikan otonomi lokal yang lebih luas terhadap daerah jajahannya termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Menurut laporan Van Niel pada tahun 1907 di Indonesia hanya terdapat sebanyak 135.555 orang murid sekolah di Jawa dan selebihnya sebanyak 132.385 orang murid sekolah di Luar Jawa. Dengan adanya etise politik pada tahun 1930, jumlah murid sekolah umum sebanyak 1.656.244 orang, sekolah kejuruan sebanyak 15.716 orang dan hanya sebanyak 178 orang mahasiswa Indonesia saja yang belajar di Perguruan Tinggi/Universitas. Jumlah pelajar dan mahasiswa sebanyak 1.672.138 orang ini hanya merupakan 2,75 % saja dari seluruh jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu. Dengan demikian keadaan ini akan sangat memperlemah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masa itu.

Perlu dicatat pada tahun 1938 GNP Hindia Belanda pada waktu itu sebanyak f 2.700.000.000,- dan dengan jumlah penduduk sebanyak 68.400.000 jiwa, maka GNP per kapita rata-rata adalah sebanyak f 39,-. Distribusi pendapatan Nasional Hindia Belanda pada tahun 1939 menurut pembentukan nilai tambahnya meliputi sebesar 52,7 % berasal dari sektor Agraris/Pertanian, sebesar 6,7 % dari sektor Perdagangan, sebesar 14,9 % berasal dari sektor Industri & Kerajinan Rakyat serta sebesar 25,7 % berasal dari Sektor lainnya.

Dalam masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun keadaan perekonomian Indonesia semakin menjadi parah karena Indonesia juga dijadikan salah satu negara jajahan yang diperas dananya guna membiayai perang Asia Timur Raya pada masa itu. Tidak bedanya dengan Pemerintah Kolonial Belanda dikenal adanya kerja rodi dan tanam paksa, maka zaman penjajahan Jepang pun juga ada Romusha/ kerja paksa yang juga banyak dikirim ke Luar Negeri seperti halnya ke Birma, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Ada juga kewajiban tanam jarak. Banyak lokomotif, kapal peninggalan Belanda yang dikirim ke Jepang serta banyak harta rampasan perang yang berasal dari Belanda dan Tionghoa/Timur Asing juga ludes dilahap Jepang waktu itu. Kesan yang sangat tragis sampai-sampai rakyat banyak yang bercelana karung dengan kutu yang banyak. Perbandingan nilai mata uang Gulden terhadap nilai uang kertas "Serie Gatutkaca", sangat bertolak belakang dimana bila tiap sen mata uang Belanda sudah dapat untuk membeli beras/makanan seorang sehari, maka uang kertas Jepang harus menghitung dalam satuan puluhan rupiah,

bahkan pada saat-saat terakhir dari pendudukan Jepang masyarakat pedesaan lebih senang melakukan perdagangan barter dengan masyarakat kota yang mengungsi/mencari keselamatan hidupnya ke desa-desa.

Namun ada segi positifnya yaitu kebangkitan rakyat Indonesia untuk merdeka saat itu mulai timbul secara serempak karena pengaruh kemenangan Jepang terhadap penjajah di sebagian benua Asia tersebut. Politik membalas budi ini ternyata mengalami kegagalan total hingga Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942.

Hadirin yang saya hormati,

2. PERKEMBANGAN SOSIO-EKONOMI INDONESIA MASA PASCA KEMERDEKAAN

Dalam pancawarsa pertama masa pasca kemerdekaan (1945-1950), data/indikator ekonomi nasional dapat dikatakan hampir tidak ada. Hal ini dapat dimengerti sebab setelah Belanda menyerah pada Jepang, kemudian masa pendudukan Jepang hingga saat proklamasi kemerdekaan, serta kemudian diikuti adanya Clash I dan Clash II serta pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh pada tanggal 17 Agustus 1950 telah terjadi kekacauan baik di bidang keamanan, sosial politik maupun di bidang perekonomian.

Dalam periode 10 tahun sejak menjelang kekuasaan Hindia Belanda berakhir (1938-1948) tingkat pendapatan masyarakat per kapita telah menurun dari sebesar US \$ 75,27 pada tahun 1938 menjadi tinggal US \$ 51,27 pada tahun 1948. Dengan demikian dalam periode tersebut telah terjadi penurunan tingkat kemakmuran rata-rata sebesar 3,91 % setiap tahun. Dalam mengevaluasi perkembangan perekonomian pada pancawarsa kedua pasca kemerdekaan tersebut, tak dapat dilupakan jasa-jasa dari :

- Dr.J.J. Polak, telah melakukan penghitungan Pendapatan Nasional yang pertama kali di Indonesia setelah Perang Dunia I, yaitu antara tahun 1921-1939 untuk melihat pengaruh perang dan depresi besar di Amerika tahun 1920 terhadap keadaan perekonomian di Hindia Belanda/Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
- Dr.S.D. Neumark, pada tahun 1953 juga melakukan penghitungan untuk tahun 1951 dan tahun 1952 guna memperoleh data dasar bagi perencanaan pembangunan Indonesia waktu itu.
- Leon A. Mears juga telah melakukan penaksiran Pendapatan Nasional Indonesia tahun 1951 sampai dengan tahun 1955.

Baik Neumark maupun Mears masing-masing menggunakan hasil Dr.J.J. Polak sebagai dasar sekaligus pembandingan terhadap hasil perhitungan mereka.

Dalam pancawarsa recovery di bidang per tahun 1951 adalah US yaitu seperti halnya US \$ 78,59 sehingga dibuktikan oleh Leon bukunya "Inflasi dan rata setiap tahun Pend pertumbuhan pendu Pendapatan Nasional p Pertumbuhan GNP meningkat dengan 6, dengan 7,2 %, tahun tahun 1958 sebesar 4,

Berdasarkan data setiap tahun telah m Kepulihan kembali Nasional per kapita t Kepulihan kembali kemerdekaan Repub meliputi :

- Kekacauan yang walaupun belu
- Pemerintah m beroperasi di l
- Telah terjadi Internasional ataupun Perse

Ketiga faktor te setelah selesai pe Internasional. H menasionalisasi Indonesia dengan Peranan Perdag telah meningkat tahun 1952. Sela bank-an domest berasal dari lem

kat pedesaan lebih
ang mengungsi/men

uk merdeka saat itu
n Jepang terhadap
budi ini ternyata
ahun 1942.

KEMERDEKAAN

nta/indikator ekonomi
sebab setelah Belanda
ga saat proklamasi
i pemberontakan PKI
ublik Indonesia yang
um baik di bidang

erakhir (1938-1948)
\$ 75,27 pada tahun
lam periode tersebut
setiap tahun. Dalam
pasca kemerdekaan

yang pertama kali di
tuk melihat pengaruh
an perekonomian di

ntuk tahun 1951 dan
nan Indonesia waktu

mal Indonesia tahun

Polak sebagai dasar

Dalam pancawarsa kedua tersebut, yaitu antara tahun 1950 hingga tahun 1955 telah terjadi recovery di bidang perekonomian Indonesia. Tingkat pendapatan masyarakat per kapita pada tahun 1951 adalah US \$ 54,62 dan pada tahun 1956 telah dapat kembali ke tingkat semula yaitu seperti halnya pada tahun 1938 lagi menjadi sebanyak f 39,64,- atau sebanyak US \$ 78,59 sehingga rata-rata tiap tahun telah meningkat dengan 7,55 %. Hal ini selain telah dibuktikan oleh Leon A. Mears juga telah diperkuat oleh Prof. Dr. Ali Wardana dalam bukunya "Inflasi dan Ketegangan Struktural", di mana antara tahun 1952 hingga 1957 rata-rata setiap tahun Pendapatan Nasional Indonesia telah meningkat dengan sebesar 6,98 %. Bila pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahun pada waktu itu adalah sebesar 1,66 % maka Pendapatan Nasional per kapita masyarakat masih meningkat dengan sebesar 5,32 %. Pertumbuhan GNP rata-rata setiap tahun menurut Prof. Dr. Ali Wardana secara rinci meningkat dengan 6,5 % pada tahun 1952, sebesar 6,6 % tahun 1953, tahun 1954 tumbuh dengan 7,2 %, tahun 1955 sebesar 6,8 %, tahun 1956 sebesar 7,1 %, tahun 1957 sebesar 7,1%, tahun 1958 sebesar 4,9 % serta tahun 1959 dan tahun 1960 masing-masing sebesar 2,3%.

Berdasarkan data Mears, recovery tingkat Pendapatan Nasional per kapita tersebut rata-rata setiap tahun telah meningkat dengan sebesar 7,36 % (lihat tabel 1).

Kepulihan kembali Ekonomi Nasional diukur dengan perkembangan tingkat Pendapatan Nasional per kapita tersebut di atas dapat digambarkan seperti pada grafik 1.

Kepulihan kembali pertumbuhan Ekonomi Nasional pada pancawarsa kedua setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang meliputi :

- Kekacauan yang terjadi di bidang politik, sosial dan ekonomi telah mulai dapat diatasi walaupun belum dapat dikatakan secara penuh.
- Pemerintah mulai memberikan kesempatan bagi pengusaha/pemilik modal asing untuk beroperasi di Indonesia terutama di sektor Perdagangan Internasional.
- Telah terjadi peningkatan di sektor Perdagangan baik untuk sub-sektor Perdagangan Internasional secara pesat bila dibandingkan dengan sebelum perang kemerdekaan ataupun Perang Dunia II.

Ketiga faktor tersebut di atas saling berpengaruh antara yang satu terhadap yang lain, sebab setelah selesai perang dan merdeka; pemerintah Indonesia mulai masuk ke dunia perdagangan Internasional. Hal ini dipandang sangat sesuai dengan hasrat pemerintah yang akan menasionalisasikan aparat distribusi perdagangan yaitu Kolonial Belanda kepada warga negara Indonesia dengan jalan memberikan privilese/hak istimewa serta fasilitas kemudahan lainnya. Peranan Perdagangan dalam kontribusi nilai tambah sektoralnya terhadap Pendapatan Nasional telah meningkat dari 6,7 % pada tahun 1939 menjadi 15,2 % pada tahun 1951 dan 13,4 % pada tahun 1952. Selain itu, di bidang perkreditan baik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga per-bank-an domestik dan asing telah meningkat pula. Peningkatan peranan perkreditan yang berasal dari lembaga per-bank-an tersebut nampak pada tabel 2.

Tabel 1.

TAKSIRAN PENDAPATAN NASIONAL TAHUN 1951 s/d 1955

Keterangan	1951	1952	1953	1954	1955	Pertumbuhan Setahun (%)
Pendapatan Nasional dengan harga saat perhitungan (dalam jutaan Rp)	63.598	78.763	83.252	92.550	119.919	17,18
Pendapatan Nasional dengan harga th 1938 (dalam jutaan f)	2.199	2.317	2.871	2.955	3.098	8,95
Pendapatan Nasional perkapita dengan harga saat perhitungan (dalam Rp)	819	1.000	1.039	1.138	1.454	15,43
Pendapatan Nasional perkapita dengan harga th 1938 (dalam f)	28,3	29,4	35,9	36,4	37,6	7,36
Perbandingan ekspor terhadap Pendapatan Nasional (dalam %)	9	14	12	11	9	-
Perbandingan penerimaan pemerintah terhadap Pendapatan Nasional (dalam %)	15	12	16	12	12	-

Sumber : Leon A. Mears "Economic Development in Indonesia Through 1958"
EKI Jan./Febr. 1961 Halaman 28, disusun dan diolah kembali.

Grafik : 1 PERUBAHAN PENDAPATAN PERKAPITA DI INDONESIA TAHUN 1938-1960

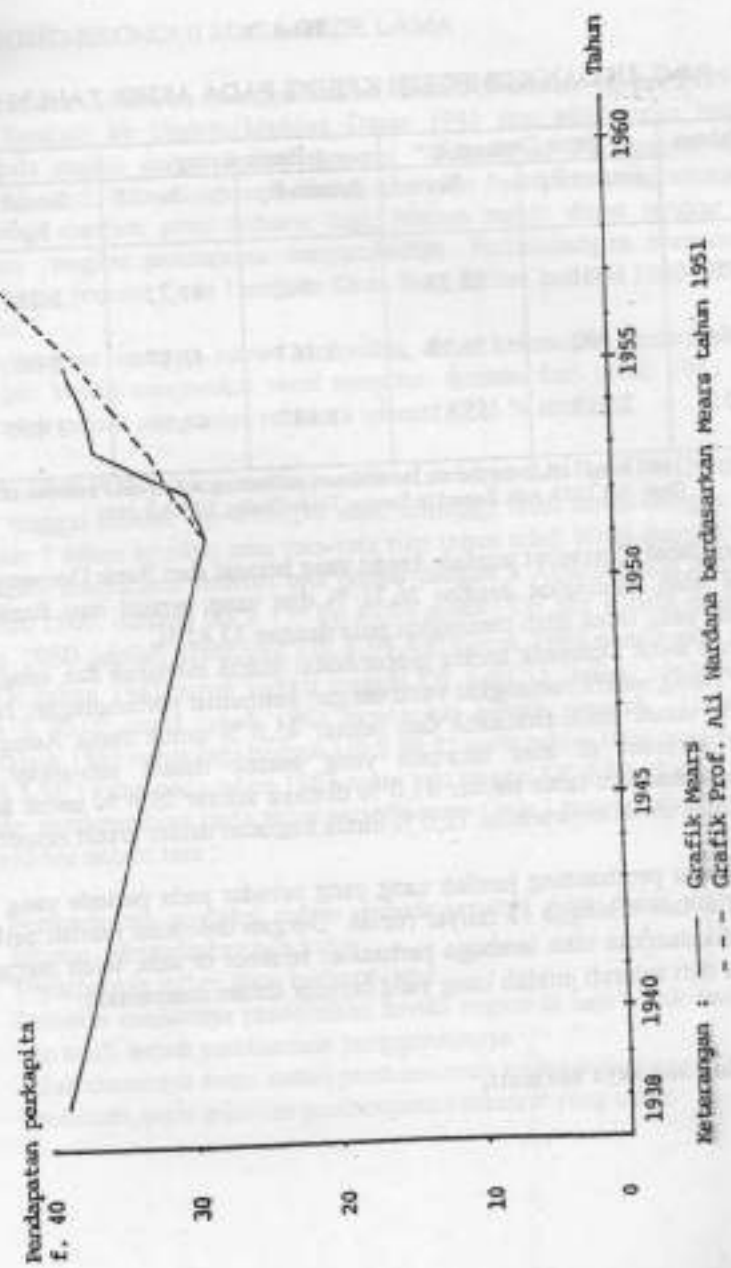
pendapatan perkapita
f. 40

1951 s/d 1955

	1955	Pertumbuhan Setahun (%)
54	119.919	17,18
55	3.098	8,95
38	1.454	15,43
64	37,6	7,36
1	9	-
2	12	-

rough 1958"
tali.

Grafik : 1 PERUBAHAN PENDAPATAN PERKAPITA
DI INDONESIA TAHUN 1938-1960



Tabel 2.

JUMLAH DAN KOMPOSISI KREDIT PADA AKHIR TAHUN 1953-1955

Tahun	Bank Domestik		Bank Asing		Jumlah	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
1953	1.316	58,28	942	41,72	2.258	100,00
1954	1.492	56,13	1.167	43,87	2.660	100,00
1955	2.113	55,61	1.687	44,39	3.800	100,00

Sumber : Liem Kong List, Some Recent Development in Banking and Credit Provisions of The Indonesian Bank Act 1953, with Regard to Foreign Trade Credits, EKI Juli 1956.

Dari tabel 2 tersebut jumlah kredit yang berasal dari Bank Domestik rata-rata tiap tahun telah meningkat dengan 26,71 % dan yang berasal dari Bank Asing dalam periode yang sama telah meningkat pula dengan 33,82 %.

Peranan Bank Domestik secara proporsional makin menurun dan sebaliknya peranan Bank Asing makin meningkat yaitu dengan komposisi perbandingan rata-rata sekitar 55,0 % untuk Bank Domestik dan sekitar 45,0 % untuk Bank Asing. Dari jumlah kredit tersebut di atas rata-rata yang masuk dalam sub-sektor Perdagangan Internasional saja telah sekitar 37,0 % dimana sekitar 25,9 % untuk kegiatan kredit impor dan selebihnya sekitar 12,0 % untuk kegiatan dalam kredit ekspor.

Sebagai pembanding jumlah uang yang beredar pada periode yang bersangkutan adalah antara 9 hingga 12 milyar rupiah. Dengan demikian jumlah perkreditan yang telah dikeluarkan oleh lembaga perbankan tersebut di atas, telah merupakan sekitar 25,0 % dari seluruh jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

3. SITUASI SOSIO-EK

Sejak Presiden Soekarno menyatakan kembali ke demokrasi di kabinet 100 Menteri, periode tersebut menunjukkan perkembangan tingkat pertumbuhan Indonesia dalam masa transisi pada tabel 3. Dari tabel 3 tersebut Lama PDB per kapita tahun 1967 telah terj

Pada tahun 1960 PDB per kapita tahun 1967 tinggal dalam periode 7 tahun PDB per kapita masih konstan tahun 1960 pada tahun 1960 tinggal US \$ 94,53; tahun 1967 tinggal US \$ 90,0 kemudian tahun 1968 menjadi US \$ 90,1. Kemerostotan perekonomian oleh beberapa hal

1. Pertumbuhan lajunya
2. Terdapat
3. Semak
- lain te
4. Telah
5. Pene

1953-1955

Jumlah	
Jutaan Rp	%
2.258	100,00
2.660	100,00
3.800	100,00

Divisions of The Indonesian

Domestik rata-rata tiap
Bank Asing dalam

dan sebaliknya peranan
tingan rata-rata sekitar
k Asing. Dari jumlah
o-sektor Perdagangan
untuk kegiatan kredit
it ekspor.

de yang bersangkutan
nlah perkreditan yang
ah merupakan sekitar

3. SITUASI SOSIO-EKONOMI MASA ORDE LAMA

Sejak Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya Indonesia dinyatakan pula masuk dalam sistim ekonomi "Demokrasi Terpimpin" dengan kabinet 100 Menteri, data ataupun indikator ekonomi Indonesia yang akurat pada periode tersebut menjadi amat terbatas lagi, namun masih dapat terukur dalam perkembangan tingkat pendapatan masyarakatnya. Perkembangan ekonomi Indonesia dalam masa transisi Orde Lama ka Orde Baru dalam periode 1960-1970 nampak pada tabel 3.

Dari tabel 3 tersebut nampak bahwa menjelang akhir kekuasaan pemerintah Orde Lama PDB per kapita masyarakat terus menurun dimana dari tahun 1961 hingga tahun 1967 telah terjadi penurunan rata-rata sebesar 0,36 % setahun.

Pada tahun 1960 PDB per kapita masyarakat telah berjumlah Rp 4.142,20 dan pada tahun 1967 tinggal sebesar Rp 4.039,70 saja, sehingga telah turun dengan 2,47 % dalam periode 7 tahun tersebut atau rata-rata tiap tahun telah turun dengan 0,36 %. PDB per kapita masyarakat tersebut bila dinilai dengan \$ Amerika atas dasar harga konstan tahun 1960, dimana US \$ 1 = Rp 45,28 maka PDB per kapita masyarakat pada tahun 1960 adalah sebanyak US \$ 91,48; tahun 1961 meringkat menjadi US \$ 94,53; tahun 1962 turun sedikit tinggal US \$ 94,12; tahun 1963 turun lagi tinggal US \$ 90,00; pada tahun 1964 meningkat sedikit menjadi US \$ 91,01; kemudian tahun 1965 turun lagi tinggal US \$ 89,82 serta tahun 1966 meningkat lagi menjadi US \$ 90,11 dan pada tahun 1967 turun lagi tinggal US \$ 89,22 saja. Kemerosotan perekonomian pada akhir periode masa Orde Lama tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Pertumbuhan produksi dalam periode tersebut tidak dapat mengimbangi lajunya pertumbuhan penduduk.
2. Terdapatnya inflasi yang berlarut-larut.
3. Semakin meosotnya penerimaan devisa negara di satu pihak dan di pihak lain telah terjadi pemborosan penggunaannya.
4. Telah dianutnya suatu sistim perekonomian setengah tertutup.
5. Penentuan skala prioritas pembangunan sektoral yang salah.

Tabel 3.

JUMLAH DAN PERKEMBANGAN PDB SERTA PDB PERKAPITA INDONESIA
TAHUN 1960-1970 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1960

Tahun	Produk Domestik Bruto		PDB Per Kapita	
	Jumlah (milyar Rp)	Pertumbuhan Setahun (%)	Jumlah (Rupiah)	Pertumbuhan Setahun (%)
1960 *	390,2	-	4.142,2	-
1961 *	412,6	5,74	4.280,1	3,33
1962 *	420,2	1,84	4.261,7	(4,30)
1963 *	410,8	2,24	4.075,4	(4,37)
1964 *	425,3	3,53	4.121,1	1,12
1965 *	429,9	1,08	4.067,2	(1,31)
1966 *	441,9	2,79	4.080,3	0,32
1967 *	448,0	1,38	4.039,7	(1,00)
1968 **	496,9	10,92	4.468,3	10,61
1969 **	530,8	6,82	4.672,5	4,57
1970 **	570,9	7,55	4.913,1	5,15

Sumber : * Statistik Indonesia 1968 & 1969 Biro Pusat Statistik, hal. 413 yang telah diolah kembali serta diambil seperlunya.

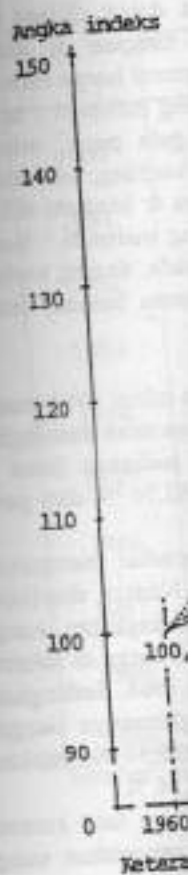
* Statistik Indonesia 1970 & 1971 Biro Pusat Statistik, hal. 374 dan 375 yang telah diolah kembali serta diambil seperlunya.

** Statistik Indonesia 1972 /1973 Biro Pusat Statistik, hal. 440 dan 441 yang telah diolah kembali serta diambil seperlunya.

- ad. 1. Dalam periode 1960-1967 Produk Domestik Bruto meningkat dengan 14,81 %, sedangkan penduduk dalam periode yang sama meningkat dari 95.289.000 jiwa menjadi 109.964.000 jiwa atau telah meningkat dengan 15,40 %.

Dalam periode ini Indonesia dapat dikatakan telah masuk ke dalam "Population Trap" ataupun perangkap penduduk, karena pertambahan penduduk telah lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto dalam kurun waktu yang sama. Penggambaran tentang perangkap penduduk tersebut dapat dilihat pada grafik 2.

Dari grafik 2 tersebut nampak bahwa "Population Trap Theory" telah berlaku di Indonesia dalam masa akhir pemerintahan Orde Lama. Bahkan dalam awal Orde



KAPITA INDONESIA
N TAHUN 1960

DB Per Kapita	
	Pertumbuhan Setahun (%)
	-
	3,33
	(4,30)
	(4,37)
	1,12
	(1,31)
	0,32
	(1,00)
	10,61
	4,57
	5,15

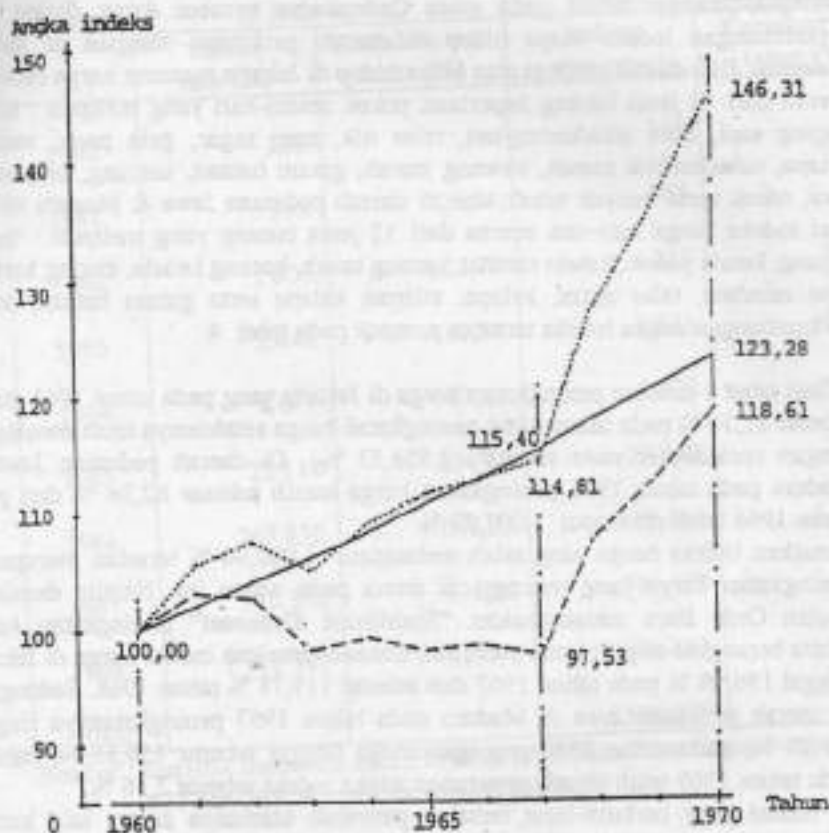
g elah diolah kembali serta
375 yang telah diolah
41 yang telah diolah kembali

tingkat denan 14,81 %,
cat dari 95.289.000 jiwa
5,40 %

k ke dalam "Population
an penduduk telah lebih
Domestik Bruto dalam
gkap penduduk tersebut

"heory" telah berlaku di
ahkan dalam awal Orde

Grafik : 2 POPULATION TRAP DI INDONESIA
TAHUN 1960 - 1970



Keterangan : ——— Trend penduduk
 - - - - - Trend GDP atas dasar harga konstan 1960
 Trend income perkapita atas dasar harga konstan Th. 1960

Angka indeks Th. 1960 = 100

Barupun masih tampak daerah perangkap penduduknya, namun makin lama terus makin mengecil yang pada akhirnya telah tidak terdapat lagi pada awal Pelita I, karena telah dimulainya pelaksanaan program pembangunan di bidang ekonomi dan sekaligus di bidang kependudukan lewat Keluarga Berencana (KB).

- ad. 2. Berlarut-larutnya inflasi pada masa Orde Lama tersebut dapat dilihat dari perkembangan indeks biaya hidup di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Bila dilihat peningkatan biaya hidup di Jakarta menurut harga rata-rata eceran dari 15 jenis barang keperluan pokok sehari-hari yang meliputi : beras, daging sapi, ikan asin/kering/teri, telur itik, susu segar, gula pasir, minyak kelapa, cabe/lombok merah, bawang merah, garam bataan, kentang, teh, sabun cuci, rokok serta minyak tanah; dan di daerah pedesaan Jawa & Madura dilihat dari indeks harga rata-rata eceran dari 12 jenis barang yang meliputi : beras, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, daging kerbau, ikan asin/teri, telur ayam, kelapa, minyak kelapa serta garam bataan, maka perkembangan angka indeks tersebut nampak pada tabel 4.

Dari tabel 4 tersebut peningkatan harga di Jakarta yang pada tahun 1961 masih sebesar 21,34 % pada tahun 1966 peningkatan harga setahunnya telah meningkat dengan spektakuler yaitu sebesar 1.058,53 % . Di daerah pedesaan Jawa & Madura pada tahun 1961 peningkatan harga masih sebesar 62,36 % dan pada tahun 1966 telah mencapai 1.007,73 %.

Kenaikan indeks harga yang telah melampaui 1.000,00 % tersebut merupakan peningkatan harga yang tertinggi di dunia pada waktu itu. Namun demikian setelah Orde Baru melaksanakan "Stabilisasi Ekonomi" peningkatan harga secara berangsur-angsur terus menurun, dimana kenaikan indeks harga di Jakarta tinggail 196,98 % pada tahun 1967 dan sebesar 119,78 % tahun 1968. Sedangkan di daerah pedesaan Jawa & Madura pada tahun 1967 peningkatannya tinggal 185,29 %, pada tahun 1968 peningkatannya tinggal sebesar 150,58 %, bahkan pada tahun 1969 telah terjadi penurunan angka indeks sebesar 2,56 %.

Inflasi yang berlarut-larut tersebut penyebab utamanya antara lain karena terdapatnya defisit pada APBN setiap tahun serta terdapatnya pencetakan uang yang berlebihan, sehingga mengakibatkan peredaran uang juga meningkat dengan berlebihan juga (lihat tabel 5).

PERKEMBANG
PEDESA

Tahun	
1960	
1961	
1962	
1963	
1964	
1965	
1966	
1967	
1968	
1969	

Sumber : ...
377

aduknya, namun makin lama tidak terdapat lagi pada awal program pembangunan di bidang Perencanaan Keluarga Berencana (KB).

Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan maupun di daerah Jakarta menurut harga rata-rata hari-hari yang meliputi : beras, gula pasir, minyak, sabun, kentang, teh, sabun, dan bataan. Di daerah pedesaan Jawa & Madura dilihat barang yang meliputi : beras, kacang kedele, daging kerbau, serta garam bataan, maka tabel 4.

yang pada tahun 1961 masih setahunnya telah meningkat Di daerah pedesaan Jawa & sebesar 62,36 % dan pada

100,00 % tersebut merupakan waktu itu. Namun demikian "peningkatan harga" kenaikan indeks harga di Jakarta 78 % tahun 1968. Sedangkan 1967 peningkatannya tinggal sebesar 150,58 %, bahkan sebesar 2,56 %.

Hal ini utamanya antara lain karena terdapatnya pencetakan uang baru dan uang juga meningkat

Tabel 4.

PERKEMBANGAN ANGKA INDEKS BIAYA HIDUP DI JAKARTA DAN DAERAH PEDESAAN DI JAWA & MADURA TAHUN 1960-1969 (1953=100)

Tahun	Jakarta menurut 15 jenis barang		Pedesaan Jawa & Madura menurut 12 jenis barang	
	Indeks rata-rata	Kenaikan tiap tahun (%)	Indeks rata-rata	Kenaikan tiap tahun (%)
1960	328	-	348	-
1961	398	21,34	565	62,36
1962	1.006	152,76	1.721	204,60
1963	2.446	143,14	3.541	105,75
1964	4.677	91,21	7.379	108,39
1965	23.118	394,29	25.140	240,70
1966	267.830	1.058,53	278.484	1.007,73
1967	795.396	196,98	794.495	185,29
1968	1.748.143	119,78	1.990.813	150,58
1969	-	-	1.939.879	(2,56)

Sumber : Statistik Indonesia tahun 1968 & 1969 Biro Pusat Statistik Jakarta, hal. 377 dan 385. disusun dan diolah kembali.

Sedangkan defisit APBN setiap tahun dalam periode tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 5.

JUMLAH DAN PERKEMBANGAN UANG YANG BEREDAR DI INDONESIA
TAHUN 1960-1968 (Juta Rp)

Tahun	Jumlah uang yang beredar (Jutaan Rp)	Pertumbuhan Setahun	
		Jutaan Rp	%
1960	47.836	12.953	37,13
1961	67.643	19.807	41,41
1962	135.898	68.255	100,90
1963	263.360	127.462	93,79
1964	725.000	461.640	175,29
1965	2.572.000	1.847.000	254,76
1966 *	22.208	19.636	763,45
1967	51.471	29.263	131,77
1968	113.894	62.423	121,28

Keterangan : * Sejak Januari 1966 Rp 1.000,- = Rp 1,-

Sumber : Statistik Indonesia tahun 1968 & 1969 Biro Pusat Statistik Jakarta hal. 312 disusun dan diolah kembali.

Dari tabel 5 dan 6 tersebut nampak lebih jelas bahwa hampir sebagian terbesar dari defisit Anggaran Belanja Negara telah dibiayai dengan mencetak uang, sehingga uang yang beredar makin bertambah banyak. Untuk tahun 1963 hingga tahun 1966 jumlah pengeluaran Anggaran Belanja lebih dari dua kali lipat bila dibandingkan dengan jumlah penerimaannya, sehingga defisit anggarannya akan lebih dari 100,00 %.

Setelah Orde Baru defisit anggaran mulai ditekan dan pada tahun 1968 mulai dianut suatu sistem Anggaran Belanja Berimbang (Balanced Budget).

JUMLAH PENERIMAAN

Tahun	Penerimaan
1960	53.648
1961	62.218
1962	74.020
1963	162.130
1964	283.380
1965	960.700
1966*	13.100
1967	84.500
1968	185.000

Keterangan : * Sejak Januari 1966 Rp 1.000,- = Rp 1,-
Sumber : Statistik Indonesia tahun 1968 & 1969 Biro Pusat Statistik Jakarta hal. 312 disusun dan diolah kembali.

ad. 3. Penerimaan dan pengeluaran

de tersebut dapat dilihat

BEREDAR DI INDONESIA
(p)

mbuhan Setahun

%
37,13
41,41
100,90
93,79
175,29
254,76
763,45
131,77
121,28

Biro Pusat Statistik Jakarta

hampir sebagian terbesar
dengan mencetak uang,
banyak. Untuk tahun 1963
selanja lebih dari dua kali
annya, sehingga defisit

n pada tahun 1968 mulai
nced Budget).

Tabel 6.

JUMLAH PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN DEFISIT APBN
TAHUN 1960-1968 (Juta Rp)

Tahun	Jumlah		Defisit Anggaran	
	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	(%)
1960	53.648	60.544	(6.896)	(12,85)
1961	62.218	88.522	(26.304)	(42,28)
1962	74.020	122.072	(48.058)	(64,93)
1963	162.130	329.800	(167.670)	(103,42)
1964	283.386	681.330	(397.944)	(140,42)
1965	960.766	2.526.320	(1.565.554)	(162,95)
1966*	13.142	29.433	(16.291)	(123,96)
1967	84.900	87.555	(2.655)	(3,13)
1968	185.283	185.283	0,00	0,00

Keterangan : * Sejak Januari 1966 Rp 1.000,- = Rp 1,-

Sumber : Statistik Indonesia tahun 1968 & 1969 Biro Pusat Statistik Jakarta
hal. 317, disusun dan diolah kembali.

ad. 3. Penerimaan devisa negara makin lama makin merosot, demikian juga
pengeluarannya banyak yang tidak terkontrol lagi. Perkembangan penerimaan
dan pengeluaran devisa dalam periode 1962-1968 tersebut nampak pada tabel 7.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN VALUTA DEVERA INDONESIA
TAHUN 1962-1968 (Ribuan US \$)

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			Jumlah	(%)
1962	606.524	634.400	(27.876)	(4,60)
1963	477.931	588.576	(110.645)	(23,15)
1964	600.273	635.335	(35.062)	(5,84)
1965	440.480	556.705	(116.225)	(26,39)
1966	413.225	432.436	(19.211)	(4,65)
1967	392.337	324.241	68.096	17,36
1968	326.555	311.974	14.581	4,47

Sumber : Statistik Indonesia tahun 1968 & 1969 Biro Pusat Statistik Jakarta hal. 340, disusun dan diolah kembali.

Baru pada tahun 1967 dan tahun 1968 terdapat surplus penerimaan devisa. Pengeluaran yang terbanyak adalah untuk mengimpor beras dan membayar modal/mesin-mesin industri berat. Penggunaan devisa untuk impor beras dan pembayaran barang modal/mesin saja pada tahun 1962 sebesar 44,42 % untuk impor beras dan sebesar 32,79 % untuk membayar mesin-mesin. Pada tahun 1963 impor beras sebesar 41,78 % dan untuk membayar mesin-mesin sebesar 24,92 %. Untuk tahun 1964 impor beras sebesar 42,00 % dan sebesar 21,42 % untuk membayar mesin-mesin. Tahun 1965 untuk impor beras sebesar 51,93 % dan sebesar 16,96 % untuk membayar barang modal. Pada tahun 1966 impor beras

Penerimaan sebesar 53,84 % 1962 yang seba tahunnya telah t

ad. 4. Pada akhir ma ri/menutup diri berhaluan libera sosialis seperti b blok sosialis lain Bahkan Indone Malaysia, Singg
Iran Jaya (merupakan lu terpencil di pe pemberontakar dengan mening

ad. 5. Pemerintah dasar/berat un nomian. Pem juga telah dia untuk Indones dapat menggr sosialis saja. Misalnya indu dari instalasi instalasi tersel sebagian terba nanyapun pa

devisa lebih besar dari
nya mengalami devisa.

SA INDONESIA

Saldo	
h	(%)
76)	(4,60)
5)	(23,15)
2)	(5,84)
5)	(26,39)
1)	(4,65)
6)	17,36
1)	4,47

Statistik Jakarta hal.

is penerimaan devisa
beras dan membayar
untuk impor beras dan
sebesar 44,42 % untuk
mesin. Pada tahun 1963
mesin sebesar 24,92 %
besar 21,42 % untuk
sebesar 51,93 % dan
tahun 1966 impor beras

masih menggunakan sebesar 63,21 % dari seluruh pengeluaran devisa tetapi pembayaran modal ditekan hingga tinggal 13,04 % saja.

Pada tahun 1967 dan pada tahun 1968 impor beras masih sebesar 64,99 % dan 63,99 %, sedangkan pembayaran modal/mesin tinggal sebesar 2,87 % dan 1,15 % saja.

Penerimaan devisa pada tahun 1968 tinggal sebanyak US \$ 326.555.000,- atau sebesar 53,84 % saja bila dibandingkan dengan penerimaan devisa pada tahun 1962 yang sebanyak US \$ 606.524.000,-. Dengan demikian rata-rata setiap tahunnya telah turun dengan sebesar 9,80 %.

- ad. 4. Pada akhir masa Orde Lama pemerintah Indonesia menganut asas berdiplomasi/menutup diri terhadap dunia luar terutama terhadap negara-negara yang berhaluan liberal dan hanya berhubungan dengan negara-negara komunis serta sosialis seperti halnya : Uni Sovyet, RRC, Cekoslovakia, Polandia, Hongaria serta blok sosialis lainnya.

Bahkan Indonesia keluar dari PBB serta mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, Singapura dan Belanda dalam rangka Trikora untuk membebaskan Irian Jaya (Irian Barat). Kembalinya Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi merupakan hasil karya Orde Lama yang patut dihormati. Indonesia makin terpencil di percaturan politik dan ekonomi Dunia serta kemudian terjadi pula pemberontakan G 30 S/PKI dan kemudian berakhir kekuasaan Orde Lama dengan meninggalkan kehancuran bidang sosial, ekonomi serta ketatanegaraan.

- ad. 5. Pemerintah Orde Lama telah memilih sektor industri terutama industri dasar/berat untuk mendobrak keterbelakangan di bidang pembangunan perekonomian. Pemilihan industri dasar/berat sebagai dongkrak/motor pembangunan juga telah dianut oleh pemerintah India dan Pakistan pada waktu itu. Khusus untuk Indonesia telah gagal total sebab pembangunan industri pada saat itu hanya dapat menggantungkan diri pada Uni Sovyet dan pada negara-negara blok sosialis saja.

Misalnya industri baja Cilegon pada saat itu macet total, sebab hampir 80,0 % dari instalasinya telah datang, sedangkan uang yang tersedia untuk pembangunan instalasi tersebut hanya tersedia 25,0 % saja dari nilai mesin-mesin. Akhirnya sebagian terbesar dari mesin-mesin tersebut menjadi besi tua dan pembangunannya pun pada akhirnya baru dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru.

Demikian halnya dengan pembangunan pabrik beras sintetik di Jawa Barat juga tak kunjung selesai. Banyak pembangunan proyek yang bersifat non ekonomis atau lebih banyak disebut dengan istilah proyek "mercu suar" seperti halnya Monas, Kompleks Istana Senayan untuk keperluan Ganefo, pendirian patung-patung di ibu kota dan lain sebagainya.

Pembangunan semacam ini telah menghabiskan dana cukup besar namun tidak menghasilkan produksi apapun sehingga lebih banyak menambah tekanan inflasi yang lebih parah lagi. Berbagai hal tersebut di atas menyebabkan timbulnya inflasi yang kronis dalam periode tersebut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya stagnasi di bidang perekonomian secara menyeluruh.

Hadirin yang saya hormati,

5. PERKEMBANGAN-SOSIO-EKONOMI MASA ORDE BARU

Setelah kehancuran di bidang sosial, ekonomi serta ketatanegaraan tersebut di atas maka pada tanggal 16 Agustus 1967 oleh Pejabat Presiden Jenderal Soeharto dalam pidato kenegaraannya di muka sidang MPRS mengemukakan bahwa pada tahun 1968 masih dipergunakan untuk menstabilkan perekonomian terlebih dahulu dan Pembangunan Lima Tahun Pertama dimulai pada tahun 1969.

Pada dasarnya Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Titik berat Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian dari usaha pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan nasional jangka panjang tersebut, telah disusun pula strategi kebijaksanaan sektoral maupun perwilayahan secara bertahap, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Pembangunan bidang ekonomi pada dasarnya masih banyak diwarnai oleh pendekatan sektoral, dimana perencanaan secara makro, masih mengikuti sistem pencapaian target peningkatan produksi untuk masing-masing sektor yang bersangkutan. Dengan tercapainya target sektoral tersebut di atas

diharapkan, di samping per- akan mengakibatkan perub- lainnya (non agraris) sehing- berubahnya struktur per- diperoleh landasan yang l- tahap selanjutnya.

Target transisi sektoral y- beratkan pada peranan- Produk Domestik Brut- pengelompokan primer- menyangkut pertumbuhan- PDB. Target pengemb- Nasional berdasarkan pe- kapita dalam setiap REP-

- REPELITA I : P- pertumbuhan pen- meningkat dengan
- REPELITA II : P- pertumbuhan pen- dengan rata-rata
- REPELITA III : pertumbuhan pe- dengan rata-rata
- REPELITA IV : pertumbuhan p- meningkat den-
- REPELITA V : namun pertum- per kapita aka-

etik di Jawa Barat juga bersifat non ekonomis "suara" seperti halnya efek, pendirian patung-
rup besar namun tidak menambah tekanan inflasi menyebabkan timbulnya akhirnya mengakibatkan h.
uh.

ARU

anegaraan tersebut di den Jenderal Soeharto mukakan bahwa pada omian terlebih dahulu 969.
n Manusia Indonesia sia yang berdasarkan Pembangunan Jangka asaran utama untuk dang industri, serta sebagian dari usaha n melengkapi bidang

ca panjang tersebut, perwilayahan secara gunan Lima Tahun nya masih banyak cara makro, masih utuk masing-masing tal tersebut di atas

diharapkan, di samping pendapatan per kapita setiap tahun dapat meningkat, juga akan mengakibatkan perubahan/transisi sektoral dari sektor pertanian ke sektor lainnya (non agraris) sehingga akan terjadi pola yang semakin berimbang. Dengan berubahnya struktur perekonomian secara sektoral tersebut diharapkan akan diperoleh landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

Target transisi sektoral yang dicantumkan dalam setiap Repelita hanya menitik beratkan pada peranan sektor pertanian dan sektor di luar pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target-target sektoral yang terinci yaitu pengelompokan primer, sekunder dan tersier ataupun per jenis kegiatan hanya menyangkut pertumbuhannya, bukan peranan/sumbangan nilai tambah terhadap PDB. Target pengembangan yang ingin dicapai dalam pertumbuhan ekonomi Nasional berdasarkan pertumbuhan produksi riil dan pertumbuhan pendapatan per kapita dalam setiap REPELITA adalah sebagai berikut :

- REPELITA I : Pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 5,0 % dan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 2,5 %, maka pendapatan per kapita akan meningkat dengan rata-rata 2,5 % setiap tahun.
- REPELITA II : Pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,7 % dan dengan pertumbuhan penduduk 2,3 %, maka pendapatan per kapita akan meningkat dengan rata-rata sekitar 4,4 % setiap tahun.
- REPELITA III : Pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,5 % dan dengan pertumbuhan penduduk 2,2 %, maka pendapatan per kapita akan meningkat dengan rata-rata 4,3 % setahun.
- REPELITA IV : Pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 5,0 % dan dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2,1 %, maka pendapatan per kapita akan meningkat dengan rata-rata 2,9 % setahun.
- REPELITA V : Pertumbuhan ekonomi diharapkan masih tetap sebesar 5,0 %, namun pertumbuhan penduduk diusahakan tinggal 1,9 % sehingga pendapatan per kapita akan masih dapat meningkat dengan 3,1 % setahun.

Target riil pertumbuhan ekonomi secara sektoral dalam Pembangunan Jangka Panjang I/PJP I yang merupakan rangkaian Pelita I sampai dengan Pelita V (selama 25 tahun) nampak pada tabel 8.

Tabel 8

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI INDONESIA
DALAM REPELITA I - REPALITA V

No.	Sektor	Pertumbuhan setahun (%)					Rata-Rata (%)
		Repe-lita I	Repe-lita II	Repe-lita III	Repe-lita IV	Repe-lita V	
1	Pertanian	-	3,3	3,5	3,0	3,6	3,3
2	Industri	-	12,0	11,0	9,5	8,5	10,2
3	Pertambangan & Galian	-	5,7	4,0	2,4	0,4	3,1
4	Bangunan	-	10,3	9,0	5,0	6,0	7,5
5	Trans. & Komunikasi	-	11,1	10,0	5,2	6,4	7,9
6	Lain-lain sektor	-	8,5	8,0	5,0	6,1	6,9
Rata-2 pertumbuhan (%)		5,0	6,7	6,5	5,0	5,0	5,6

Sumber : REPELITA I sampai dengan REPELITA V disusun dan diolah kembali.

Dari rata-rata target per- yang sebesar 5,6 % tersa 6,3 %, sehingga realisasi telah melampaui target de Dengan pencapaian per mengakibatkan pula terjad nampak pada tabel 9 dan 1

TRANSISI
MENURUT D

Sektor
1. Pertanian
2. Pertambangan & Galian
3. Industri
4. Perdagangan
5. Lain-lain sektor
Jumlah

Keterangan : *) Masuk
Sumber : - Laporan
- Laporan
- Statistik
- Statistik
- Statistik
- Statistik
disusun

dalam Pembangunan Jangka
 mpaai dengan Pelita V (selama 25

ORAL DI INDONESIA
 LITA V

ahun (%)		Rata-Rata (%)
Repe- lita IV	Repe- lita V	
3,0	3,6	3,3
9,5	8,5	10,2
2,4	0,4	3,1
5,0	6,0	7,5
5,2	6,4	7,9
5,0	6,1	6,9
5,0	5,0	5,6

usun dan diolah kembali.

Dari rata-rata target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam PJP I selama 25 tahun yang sebesar 5,6 % tersebut ternyata telah tercapai dengan pertumbuhan riil sebesar 6,8 %, sehingga realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini secara rata-rata telah melampaui target dengan sebesar 21,43 %.

Dengan pencapaian pertumbuhan yang telah melampaui target tersebut telah mengakibatkan pula terjadinya transisi sektoral dalam perekonomian Indonesia seperti nampak pada tabel 9 dan 10.

Tabel 9.

TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA
 MENURUT DISTRIBUSI NILAI TAMBAH TAHUN 1939-1992

Sektor	Distribusi Nilai Tambah Sektoral (%)					
	1939	1961	1971	1980	1990	1992
1. Pertanian	52,70	50,10	45,90	30,66	19,42	18,41
2. Pertambangan & Galian	*)	3,00	5,60	9,26	15,19	14,49
3. Industri	14,90	13,00	9,40	15,26	19,35	20,48
4. Perdagangan	6,70	16,80	17,70	16,58	16,13	16,10
5. Lain-lain sektor	25,70	17,10	21,40	28,23	29,91	30,52
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Masuk dalam sektor lain-lain

Sumber : - Laporan Mears dan S.D. Neumark dan Polak

- Laporan Tahun Pembukuan 1960-1965 Bank Indonesia, Hal. 3

- Statistik Indonesia 1974/1975, BPS, Jakarta, Hal. 513

- Statistik Indonesia 1982, BPS, Jakarta, Hal. 386

- Statistik Indonesia 1992, BPS, Jakarta, Hal. 577

- Statistik Indonesia 1993, BPS, Jakarta, Hal. 601

disusun dan diolah kembali.

Tabel 10.

TRANSISI SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT DISTRIBUSI
PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN 1930-1990

Sektor	Distribusi Pekerja Sektoral (%)			
	1930	1971	1980	1990
1. Pertanian	67,70	62,85	54,78	49,25
2. Pertambangan & Galian	0,70	0,23	0,72	1,02
3. Industri	10,60	7,44	8,52	11,42
4. Perdagangan	6,20	10,46	12,92	14,72
5. Lain-lain Sektor	14,80	19,02	23,06	23,59
Jumlah :	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : - Laporan Nan Viel dan Mears.

- Biro Pusat Statistik, Jakarta, "Statistik Indonesia Tahun 1972/1973 dan Tahun 1982".
- Biro Pusat Statistik, Jakarta, "Tabel Pendahuluan Hasil Sub-Sampel Sensus Penduduk 1990, Seri : S1.
- Disusun dan diolah kembali.

Dari tabel 9 dan 10 tersebut, ternyata selama 53 tahun terakhir (1939-1992) peranan sektor Pertanian nilai tambahnya terhadap PDB Indonesia telah turun dari 52,0 % pada tahun 1939 menjadi tinggal 18,41 % saja pada tahun 1992. Sektor Pertambangan & Galian meningkat dari 2,0 % hingga 3,0 % menjadi 14,49 %, sektor Industri & Kerajinan Rakyat telah meningkat dari 14,90 % menjadi 20,46 %, sektor Perdagangan meningkat pula dari 6,70 % meningkat menjadi 16,10 % dan Sektor lainnya juga meningkat dari 25,70 % menjadi 30,52 % dalam periode 1939-1992 tersebut.

Dari berbagai uraian tersebut struktur ekonomi Indonesia PDB secara keseluruhan peranan penyerapan tenaga secara keseluruhan. Hal ini industri pengolahan ataupun proses produksi. Dampaknya tenaga kerja, yang pada berbagai sektor.

Selain itu distribusi mengakibatkan masih terdapat pemerataan kemiskinan yang berupa Inpres Des. Teringgal memperoleh dan secara berturut-turut dengan. Bila dilihat dari sistem A terdapat 2 sistem anggaran telah mengikuti "Deficit Orde Baru telah menganalisa telah terjadi "Surplus E penerimaan dan pengeluaran nampak pada tabel 1 kemakmuran masyarakat pada tabel 13 dan grafik.

Dari tabel 13 dan "Indonesia" selama 56 tahun meliputi :

- a. Pada tahun 1938-1942 terjadi "Down-Swing" turning point" pada konstan tahun 1960.
- b. Pada tahun 1949-1952 dengan sistem ekonomi

INDONESIA MENURUT DISTRIBUSI
TAHUN 1930-1990

Distribusi Pekerja Sektoral (%)		
1971	1980	1990
52,85	54,78	49,25
0,23	0,72	1,02
7,44	8,52	11,42
0,46	12,92	14,72
0,02	23,06	23,59
100,00	100,00	100,00

Indonesia Tahun 1972/1973 dan

Hasil Sub-Sampel Sensus

terakhir (1939-1992) peranan
telah turun dari 52,0 % pada
1992. Sektor Pertambangan &
di 14,49 %, sektor Industri &
di 20,46 %, sektor Perdagangan
10 % dan Sektor lainnya juga
1939-1992 tersebut.

Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa transisi/perubahan struktur ekonomi Indonesia berdasarkan indikator nilai tambah sektoralnya terhadap PDB secara keseluruhan perubahannya jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peranan penyerapan tenaga kerja secara sektoral terhadap tenaga kerja yang bekerja secara keseluruhan. Hal ini akibat terdapatnya mekanisasi terutama di sub-sektor industri pengolahan ataupun telah terjadi penggunaan kapital intensif dalam kegiatan proses produksi. Dampak yang dirasakan adalah makin mengcilnya potensi penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya telah menimbulkan akumulasi pengangguran di berbagai sektor.

Selain itu distribusi pembentukan pendapatan juga masih belum merata, yang mengakibatkan masih terdapatnya masyarakat yang tertinggal/miskin. Untuk masalah pemberantasan kemiskinan ini pemerintah telah menurunkan kebijaksanaan baru yaitu yang berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT), dimana untuk masing-masing Desa Tertinggal memperoleh dana sebanyak Rp. 60.000.000,- yang diberikan selama 3 tahun secara berturut-turut dengan jumlah Rp. 20.000.000,-.

Bila dilihat dari sistem APBN yang dianut oleh pemerintah Indonesia, maka telah terdapat 2 sistem anggaran selama 45 tahun terakhir yaitu dalam periode 1950-1967 telah mengikuti "Deficit Budget" dan dalam periode 1968-1995 selama pemerintahan Orde Baru telah menganut sistem "Balanced Budget", walaupun dalam prakteknya telah terjadi "Surplus Budget", namun surplusnya relatif kecil saja. Perkembangan penerimaan dan pengeluaran serta saldo APBN dari tahun 1950 hingga tahun 1995 nampak pada tabel 11 dan 12. Sedangkan rangkaian perkembangan tingkat kemakmuran masyarakat yang diukur dengan GNP ataupun GDP per kapita nampak pada tabel 13 dan grafik 3.

Dari tabel 13 dan grafik 3 tersebut nampak bahwa dalam "Dinamika Ekonomi Indonesia" selama 56 tahun telah terjadi "Business Cycles" yang terdiri dari 4 bagian meliputi :

- Pada tahun 1938-1948 yang sebagian besar merupakan masa pra kemerdekaan telah terjadi "Down-Swing" dalam perkembangan ekonomi Indonesia dengan "lower turning point" pada GNP per kapita US \$ 51,27 (tahun 1948) atas dasar harga konstan tahun 1960.
- Pada tahun 1949-1961 yang sebagian besar merupakan masa pasca kemerdekaan dengan sistem ekonomi terbuka telah terjadi "Recovery" ataupun "Up-Swing" dalam

Tabel 11

PERKEMBANGAN APBN DI INDONESIA TAHUN 1950-1993 (JUJUAH RUPIAH)

Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo			
			Surplus	%	Defisit	%
1950	6,996.2	8,726.5	-	-	(1,736.3)	(24.84)
1951	11,816.9	19,625.1	1,185.8	10.04	-	-
1952	12,746.8	13,625.4	-	-	(2,778.6)	(22.69)
1953	13,396.5	15,658.5	-	-	(2,668.0)	(20.22)
1954	11,788.7	13,396.7	-	-	(1,602.0)	(13.59)
1955	14,726.5	16,316.2	-	-	(2,099.7)	(14.69)
1956	18,451.5	20,015.0	-	-	(1,563.5)	(8.47)
1957	26,370.7	25,610.2	-	-	(5,039.5)	(26.50)
1958	23,272.7	35,313.0	-	-	(12,040.3)	(51.74)
1959	36,379.9	44,236.4	-	-	(13,779.5)	(46.07)
1960	53,648.8	60,546.8	-	-	(6,896.0)	(12.85)
1961	63,218.8	80,322.0	-	-	(26,304.0)	(42.20)
1962	74,626.8	122,678.8	-	-	(48,052.0)	(64.42)
1963	162,136.8	329,800.8	-	-	(167,670.0)	(103.42)
1964	283,386.0	681,336.0	-	-	(397,944.0)	(140.42)
1965	760,766.0	7,576,328.0	-	-	(1,565,554.0)	(162.95)
1966	13,142.0	27,433.0	-	-	(16,291.0)	(123.96)
1967	84,900.0	87,555.0	-	-	(2,655.0)	(3.13)
1968	185,283.0	185,283.0	0.0	0.00	-	-
1969/70	234,762.0	234,671.0	91.0	0.03	-	-
1970/71	455,174.8	457,829.8	-	-	(2,795.0)	(0.61)
1971/72	543,548.8	544,995.0	18,553.0	3.29	-	-
1972/73	748,408.8	726,324.8	12,084.0	1.61	-	-
1973/74	1,171,681.8	1,144,258.8	7,423.0	0.63	-	-
1974/75	1,985,709.8	1,973,929.8	7,780.0	0.39	-	-
1975/76	2,723,469.8	2,720,299.8	3,190.0	0.12	-	-
1976/77	3,689,370.8	3,684,244.0	5,146.8	0.15	-	-
1977/78	4,308,822.8	4,305,704.0	3,118.8	0.07	-	-
1978/79	5,381,576.8	5,299,320.0	2,256.8	0.04	-	-
1979/80	8,077,863.8	8,075,975.0	1,888.8	0.02	-	-
1980/81	11,728,864.8	11,716,198.0	4,756.8	0.04	-	-
1981/82	13,921,595.8	13,917,742.0	3,853.8	0.03	-	-
1982/83	14,358,287.8	14,335,929.8	2,358.0	0.02	-	-
1983/84	18,315,186.8	18,311,090.0	4,196.8	0.02	-	-
1984/85	19,383,566.8	19,380,800.8	2,766.0	0.01	-	-
1985/86	22,825,466.8	22,804,680.8	898.0	0.00	-	-
1986/87	21,892,600.8	21,891,090.0	1,510.8	0.00	-	-
1987/88	26,941,600.8	26,939,000.8	2,600.0	0.01	-	-
1988/89	32,995,000.8	32,990,000.0	5,000.0	0.02	-	-
1989/90	38,169,000.8	38,165,000.0	4,000.0	0.01	-	-
1990/91	49,431,000.8	49,430,000.0	1,000.0	0.00	-	-
1991/92	51,994,000.8	51,992,000.0	2,000.0	0.00	-	-
1992/93	58,168,000.8	58,166,000.0	2,000.0	0.00	-	-

Catatan : 1) Sejak Januari 1966 Rp 1.000,- = Rp 1,-

- Sumber : - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1968 & 1969, halaman 319
 - BPS Jakarta, Statistik Keuangan Tahun 1981 & 1982, halaman 328 & 329
 - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1979 & 1980, dan 1982/1983 halaman 26 dan 27
 - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1986, halaman 471
 - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1989 & 1990, halaman 474 & 438
 - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1992, halaman 474
 - Yang telah dicover dan diolah kembali.

Tahun	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo	%
1950	6,996.2	8,726.5	(1,736.3)	(24.84)
1951	11,816.9	19,625.1	1,185.8	10.04
1952	12,746.8	13,625.4	(2,778.6)	(22.69)
1953	13,396.5	15,658.5	(2,668.0)	(20.22)
1954	11,788.7	13,396.7	(1,602.0)	(13.59)
1955	14,726.5	16,316.2	(2,099.7)	(14.69)
1956	18,451.5	20,015.0	(1,563.5)	(8.47)
1957	26,370.7	25,610.2	(5,039.5)	(26.50)
1958	23,272.7	35,313.0	(12,040.3)	(51.74)
1959	36,379.9	44,236.4	(13,779.5)	(46.07)
1960	53,648.8	60,546.8	(6,896.0)	(12.85)
1961	63,218.8	80,322.0	(26,304.0)	(42.20)
1962	74,626.8	122,678.8	(48,052.0)	(64.42)
1963	162,136.8	329,800.8	(167,670.0)	(103.42)
1964	283,386.0	681,336.0	(397,944.0)	(140.42)
1965	760,766.0	7,576,328.0	(1,565,554.0)	(162.95)
1966	13,142.0	27,433.0	(16,291.0)	(123.96)
1967	84,900.0	87,555.0	(2,655.0)	(3.13)
1968	185,283.0	185,283.0	0.0	0.00
1969/70	234,762.0	234,671.0	91.0	0.03
1970/71	455,174.8	457,829.8	(2,795.0)	(0.61)
1971/72	543,548.8	544,995.0	18,553.0	3.29
1972/73	748,408.8	726,324.8	12,084.0	1.61
1973/74	1,171,681.8	1,144,258.8	7,423.0	0.63
1974/75	1,985,709.8	1,973,929.8	7,780.0	0.39
1975/76	2,723,469.8	2,720,299.8	3,190.0	0.12
1976/77	3,689,370.8	3,684,244.0	5,146.8	0.15
1977/78	4,308,822.8	4,305,704.0	3,118.8	0.07
1978/79	5,381,576.8	5,299,320.0	2,256.8	0.04
1979/80	8,077,863.8	8,075,975.0	1,888.8	0.02
1980/81	11,728,864.8	11,716,198.0	4,756.8	0.04
1981/82	13,921,595.8	13,917,742.0	3,853.8	0.03
1982/83	14,358,287.8	14,335,929.8	2,358.0	0.02
1983/84	18,315,186.8	18,311,090.0	4,196.8	0.02
1984/85	19,383,566.8	19,380,800.8	2,766.0	0.01
1985/86	22,825,466.8	22,804,680.8	898.0	0.00
1986/87	21,892,600.8	21,891,090.0	1,510.8	0.00
1987/88	26,941,600.8	26,939,000.8	2,600.0	0.01
1988/89	32,995,000.8	32,990,000.0	5,000.0	0.02
1989/90	38,169,000.8	38,165,000.0	4,000.0	0.01
1990/91	49,431,000.8	49,430,000.0	1,000.0	0.00
1991/92	51,994,000.8	51,992,000.0	2,000.0	0.00
1992/93	58,168,000.8	58,166,000.0	2,000.0	0.00

Tabel 12

PERCHINGAN APAN TAMBAN (1971/1972), APAN TAMBAN (1972/1973) DAN BAWAN TAMBAN (1972/1973) DI INDONESIA
(dalam milyar rupiah)

PERCHINGAN	1971/1972				Per tahun		PERSELENGKAPAN	1972/1973				Per tahun	
	1971	1972	1971	1972	1971	1972		1972	1973	1972	1973	1972	1973
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A. PERCHINGAN BAWAN TAMBAN	102.349,4	109.370,7	104.345,2	11.78	10,81	PERCHINGAN BAWAN	127.094,9	102.236,8	107.240,7	46,25	14,17	11,33	
I. Pemeliharaan Bagan	105.079,4	102.834,2	103.275,4	103,63	3,38	I. Belanja Pegawai	110.894,3	113.888,5	105.347,3	19,47	29,40	17,76	
1. Biaya Bani	11.807,2	9.204,8	9.812,2	119,31	3,24	1. Gaji dan Pemakan	8.888,8	10.494,2	101.414,3	10,91	17,70	16,75	
2. I. B. B.	3.378,2	3.247,2	3.643,4	8,81	3,47	2. Perjalanan Kerja	945,7	1.827,3	1.137,4	1,96	19,81	9,43	
II. Pemeliharaan Non-Bagan	17.441,4	16.885,9	152.997,4	24,34	13,02	II. Belanja Barang	2.377,7	3.798,5	4.745,3	4,00	25,87	24,32	
1. Pajak Penghasilan	14.848,5	10.892,9	119.238,4	26,70	2,19	1. Belanja Barang B. B.	2.798,5	3.335,3	4.491,3	5,71	26,37	24,42	
2. Pajak Perintah, Ritel	11.802,4	10.238,4	118.425,2	13,32	25,80	2. Belanja Barang L. B.	199,2	723,8	284,2	0,37	13,84	20,49	
3. Bea Masuk	3.145,2	3.141,3	3.243,4	49,88	2,98	III. Subsidi Daerah Bagan	4.828,9	7.490,9	8.401,4	19,78	17,48	20,32	
4. Gaji	3.198,2	3.422,8	3.799,2	6,99	25,79	1. Belanja Pegawai	3.431,3	4.445,3	7.701,1	10,17	17,74	19,91	
5. Pajak Ekspor	30,4	34,9	95,4	105,23	105,73	2. Belanja Non-Pegawai	527,6	426,4	101,3	0,43	13,77	11,08	
6. Pajak Bumi & Bangunan	1.570,1	1.420,7	1.725,4	25,38	19,89	IV. Biaya dan Biaya Lain-lain	116.761,9	107.946,7	119.214,9	22,25	7,33	1,34	
7. Pajak Lain-lain	103,8	191,7	117,3	112,57	15,23	1. Belanja Bahan Bagan	286,1	317,4	318,8	0,41	19,94	9,84	
8. Pemeliharaan Bagan Pajal	3.282,4	4.292,5	4.191,1	19,82	11,22	2. Belanja Lain-lain Bagan	116.425,8	107.629,3	117.896,1	21,84	7,47	1,38	
9. Lain-lain Biaya Bagan	216,1	2.207,4	1.473,7	1.898,75	111,43	V. Pengeluaran Bahan Lainnya	479,4	525,2	521,8	0,67	9,44	16,27	
B. PERCHINGAN PERCHINGAN	9.351,1	10.412,4	11.757,4	4,08	17,15	1. Subsidi B. B.	-	-	-	0,00	-	-	
I. Bantuan Program	424,8	-	-	100,00	0,00	2. Lain-lain	479,4	525,2	521,8	0,67	9,44	16,27	
II. Bantuan Proyek	8.126,3	10.412,4	11.757,4	9,78	17,15	PERCHINGAN PERCHINGAN	125.227,2	107.296,3	119.762,3	19,43	6,40	12,34	
						1. Pemeliharaan Bagan	110.298,9	107.264,2	117.426,5	24,38	7,98	9,42	
						2. Bantuan Program	9.128,3	10.032,1	10.335,8	15,05	9,70	12,92	
Jumlah	111.700,5	119.783,1	116.102,6	11,92	11,84	Jumlah	111.700,5	119.783,1	116.102,6	11,92	11,84		

Saluran Perchikan : APN (1971/1972) = Rp. 9.351,1 milyar
 APN (1972/1973) = Rp. 10.412,4 milyar
 APN (1971/1972) = Rp. 10.412,4 milyar
 APN (1972/1973) = Rp. 11.757,4 milyar
 APN (1971/1972) = Rp. 11.757,4 milyar
 APN (1972/1973) = Rp. 12.412,4 milyar

Sumber : Laporan Bala Keuangan Tahun Anggaran 1970/1971 - 1972/1973, Ditaman dan Statistik Perchikan.

perkembangan ekonomi Indonesia hingga GDP per kapita US \$ 94,53 (tahun 1961) atas dasar harga konstan tahun 1960.

- c. Pada tahun 1962-1967 perkembangan ekonomi Indonesia kembali "Slow-Down" dengan "lower turning point" pada US \$ 89,22 (tahun 1967). Periode ini terjadi pada saat pemerintahan Orde Lama menjelang berakhir.
- d. Pada tahun 1968-sekarang yang keseluruhannya merupakan masa Orde Baru telah terjadi "Recovery" ataupun "Up-Swing" kembali dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Insya Allah periode ini akan berjalan terus hingga perekonomian Indonesia dapat benar-benar memasuki era tinggal landas yang cukup kuat ataupun handal.

Yang menarik dalam kedua posisi "lower turning point" tersebut di atas sama-sama terjadi pada masa terjadi pemberontakan PKI yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965. Untuk itu sudah tepat dan benar bila Orde Baru memberikan prioritas pembangunan di bidang perekonomian terlebih dahulu selama ini.

Indikator makro yang lain yang dapat dipakai untuk mendiagnosa bahwa telah terjadi perubahan ekonomi yang spektakuler pada masa Orde Baru adalah dari sisi komposisi penggunaan GNP/GDP Indonesia, dimana pada tahun 1951 GNP di Indonesia yang digunakan untuk konsumsi masyarakat (C) adalah sebesar 84,40 %, untuk pengeluaran pemerintah (G) adalah sebesar 10,80 % dan untuk pembentukan kapital (I) baik yang berasal dari pemerintah sendiri maupun swasta adalah sebesar 4,80 %.

Komposisi ini pada tahun 1992 telah bergeser dengan perubahan yang cukup besar dimana untuk sektor konsumsi (C) secara proporsional telah turun menjadi tinggal 52,84 %, sektor pemerintah (G) dapat dikatakan relatif konstan yaitu sebesar 9,78 % dan yang sebesar 27,71 % adalah merupakan pembentukan kapital (I) baik yang berasal dari swasta maupun pemerintah dan selebihnya adalah merupakan pengeluaran untuk sektor Luar Negeri (X-M). Perubahan sektor konsumsi masyarakat dari 84,40 % menjadi 52,84 % dan untuk pembentukan kapital (I) dari 4,80 menjadi 27,78 % terhadap GDP adalah merupakan perubahan yang dapat dikatakan cukup spektakuler dalam perkembangan perekonomian suatu negara, sebab sektor pembentukan kapital ataupun investasi dapat dikatakan yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan.

PERKEMBANGAN G
TAHUN 1938-1979 ATAS D

Tahun	PNB/PDB Per Kapita	Pe Se
1938*	75,27	
1943*	63,27	
1948*	51,27	
1950*	53,50	
1951	54,62	
1952	56,74	
1953	69,29	
1954	70,25	
1955	72,57	
1956	78,59	
1957	83,24	
1958	87,31	
1959	89,32	
1960	91,48	
1961	94,53	
1962	94,12	
1963	90,00	
1964	91,01	
1965	89,82	
1966	90,11	
1967	89,22	
1968	95,64	
1969	102,08	
1970	107,35	

Keterangan : * Pertumbuh
Sumber : - BPS Jakarta
- BPS Jakarta
- BPS Jakarta
- World Dev

per kapita US \$ 94,53 (tahun 1961)

Indonesia kembali "Slow-Down"
tahun 1967). Periode ini terjadi pada

merupakan masa Orde Baru telah
ali dalam perkembangan ekonomi
terus hingga perekonomian Indo
landas yang cukup kuat ataupun

int* tersebut di atas sama-sama terjadi
tan PKI Madiun pada tahun 1948 dan
sudah tepat dan benar bila Orde Baru
an terlebih dahulu selama ini.

aknosa bahwa telah terjadi perubahan
lah dari sisi komposisi penggunaan
di Indonesia yang digunakan untuk
i pengeluaran pemerintah (G) adalah
baik yang berasal dari pemerintah

perubahan yang cukup besar dimana
un menjadi tinggal 52,84 %, sektor
ar 9,78 % dan yang sebesar 27,78 %
asal dari swasta maupun pemerintah
ktor Luar Negeri (X-M). Perubahan
% dan untuk pembentukan kapital
merupakan perubahan yang dapat
perekonomian suatu negara, sebab
dikatakan yang menjadi motor

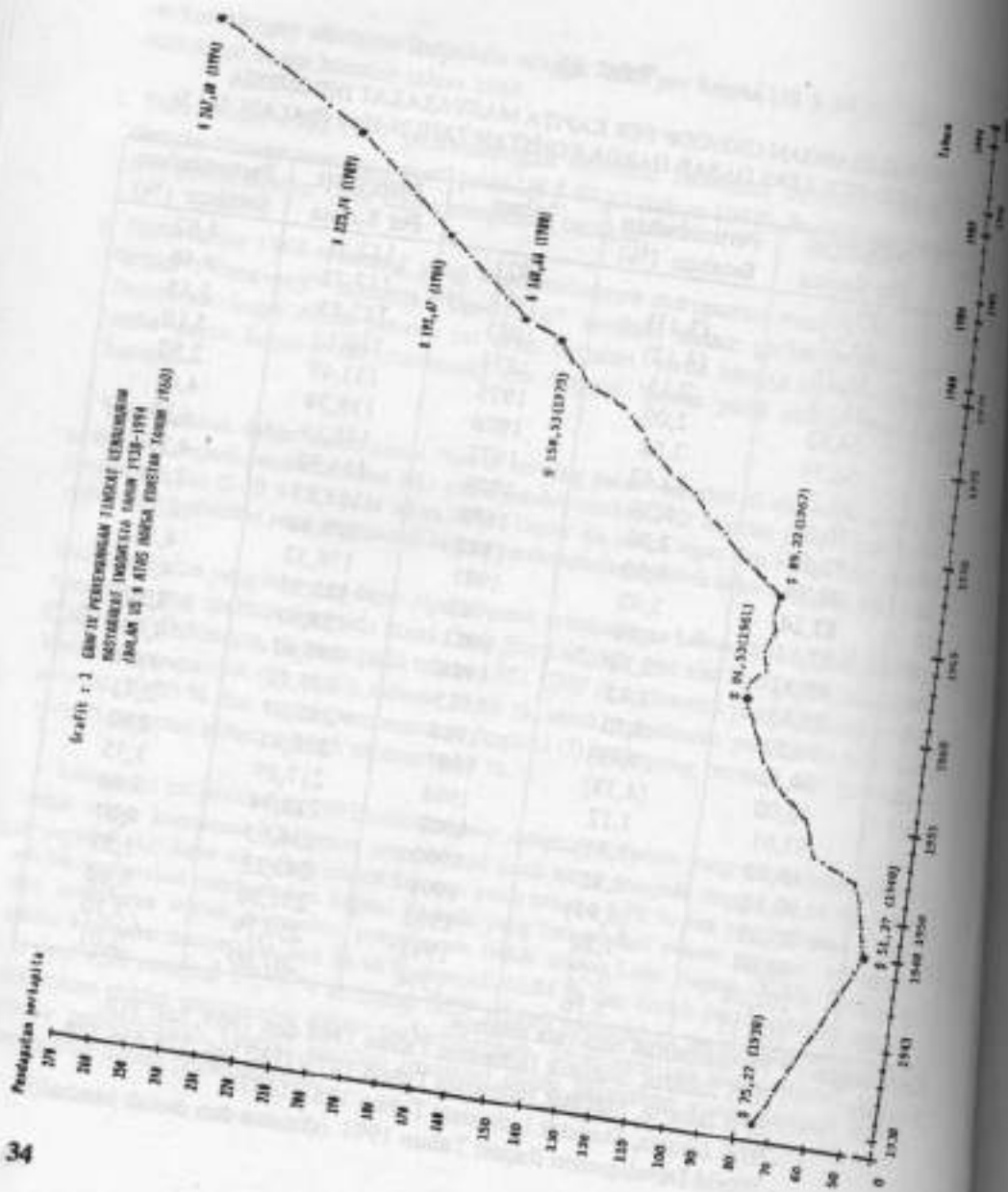
Tabel 13.

PERKEMBANGAN GNP/GDP PER KAPITA MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN 1938-1979 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1960 (DALAM US \$)

Tahun	PNB/PDB Per Kapita	Pertumbuhan Setahun (%)	Tahun	PNB/PDB Per Kapita	Pertumbuhan Setahun (%)
1938*	75,27	-	1971	112,31	4,62
1943*	63,27	(3,41)	1972	117,32	4,46
1948*	51,27	(4,12)	1973	123,83	5,55
1950*	53,50	2,15	1974	130,15	5,10
1951	54,62	2,09	1975	133,49	2,57
1952	56,74	3,88	1976	139,38	4,41
1953	69,29	22,12	1977	148,16	6,30
1954	70,25	1,39	1978	154,57	4,33
1955	72,57	3,30	1979	158,53	2,56
1956	78,59	8,30	1980	168,66	6,39
1957	83,24	5,92	1981	176,32	4,54
1958	87,31	4,89	1982	183,55	4,10
1959	89,32	2,30	1983	189,97	3,50
1960	91,48	2,42	1984	195,67	3,00
1961	94,53	3,33	1985	197,70	1,04
1962	94,12	(0,43)	1986	205,07	3,73
1963	90,00	(4,38)	1987	210,41	2,60
1964	91,01	1,12	1988	217,89	3,55
1965	89,82	(1,31)	1989	225,74	3,60
1966	90,11	0,32	1990	234,93	4,07
1967	89,22	(0,99)	1991	243,22	3,53
1968	95,64	7,20	1992	251,98	3,60
1969	102,08	6,73	1993	259,79	3,10
1970	107,35	5,16	1994	267,60	3,01

Keterangan : * Pertumbuhan rata-rata setahun.

- Sumber :
- BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1968 dan 1969, hal. 319.
 - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1979/1980 hal. 328 dan 329.
 - BPS Jakarta, Statistik Indonesia Tahun 1981-1993.
 - World Development Report Tahun 1993. (disusun dan diolah kembali)

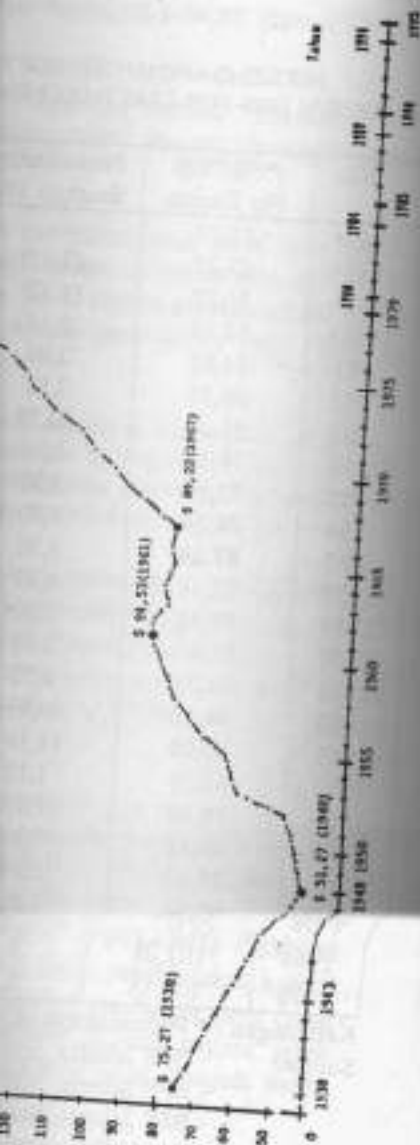


Hadirin yang saya hormati,

6. KESIMPULAN.

Dari orasi singkat tersebut dapat

1. Dalam menerapkan sistem ekonomi liberal terjadi perubahan sistem ekonomi liberal ke sistem ekonomi R. Akibat adanya depresi besar tahun 1930. Dalam era masa ekonomi yaitu dari ekonomi tertutup. Peralihan ini dilalui tahun 1959. Pemerintah Orde Baru ekonomi terpusat/ekonomi terpimpin ini. Hal ini dilakukan karena pembangunan.
2. Bersamaan dengan silih berganti Belanda/Indonesia tersebut GNP ataupun GDP mengalami peningkatan dari masa ke masa dengan lower turning point tahun 1948 dan pember...
3. Perubahan struktur ekonomi sektoral telah terjadi lewat penyerapan tenaga kerja ke sektor kapital intensif di samping penyerapan tenaga ke sektor pengangguran yang banyak pada masih terdapat...



Hadirin yang saya hormati,

6. KESIMPULAN.

Dari orasi singkat tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan sistim ekonomi ternyata pada masa pra kemerdekaan telah terjadi perubahan sistim ekonomi di Hindia Belanda yaitu dari sistim Ekonomi Liberal ke sistim Ekonomi Reguler/Campur tangan pemerintah Kolonial. Hal ini akibat adanya depresi besar di Amerika tahun 1920 serta depresi besar Dunia tahun 1930. Dalam era masa pasca kemerdekaan juga telah terjadi peralihan sistim ekonomi yaitu dari ekonomi terbuka menjadi ekonomi terpimpin/setengah tertutup. Peralihan ini dilaksanakan bersamaan dengan dekrit Presiden tahun 1959. Pemerintah Orde Baru telah menggantikan sistim ekonomi setengah tertutup/ekonomi terpimpin menjadi ekonomi yang lebih terbuka hingga dewasa ini. Hal ini dilakukan karena Orde Lama telah gagal di hampir semua bidang pembangunan.
2. Bersamaan dengan silih bergantinya sistim ekonomi yang dilaksanakan di Hindia Belanda/Indonesia tersebut tingkat kemakmuran masyarakat yang diukur dengan GNP ataupun GDP per kapita ternyata telah mengalami penurunan ataupun peningkatan dari masa ke masa, sehingga membentuk grafik "Business Cycle" dengan lower turning point pada saat terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pemberontakan G 30 S/PKI saat berakhirnya Orde Lama.
3. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia diukur dengan indikator kontribusi nilai tambah sektoral telah berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan pengukuran lewat penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini akibat telah terjadinya penggunaan kapital intensip di sub-sektor industri pengotakan sehingga mengakibatkan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih kecil dan menimbulkan pula akumulasi pengangguran yang berakibat pada masih terdapatnya ketimpangan yang berakibat pada masih terdapatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

4. Sistem APBN Indonesia sejak masa Orde Baru telah berubah dari yang semula menganut "Deficit Budget" menjadi "Balanced Budget" ataupun anggaran berimbang.
5. Pemerintah Orde Baru telah dapat mengerem inflasi yang semula tergolong dalam klasifikasi "Hyper Inflation" berubah menjadi "Creeping Inflation" yaitu suatu tingkat inflasi yang masih dapat dikendalikan.
6. Dengan program Keluarga Berencana (KB) pemerintah Orde Baru telah dapat membebaskan Indonesia dari "Population Trap" /Perangkap penduduk yang sangat berbahaya bagi peningkatan kemakmuran masyarakat.
7. Selama masa Orde Baru telah terjadi pertumbuhan akumulasi pembentukan modal yang cukup besar yaitu dengan rata-rata telah mencapai sekitar 28,0 % terhadap Produk Domestik Bruto/PDB Indonesia. Hal ini merupakan hasil tersendiri yang patut dibanggakan, karena akumulasi kapital/modal ataupun investasi tersebut adalah merupakan salah satu motor penggerak dalam pembangunan.
8. Terlepas dari segala kekurangannya, Pemerintah Orde Baru telah berhasil mencapai target laju pembangunan ekonomi dengan melampaui sekitar 20,0 % dari target pembangunan rata-rata dalam 5 Pelita ataupun dalam periode PJP-1 (Pembangunan Jangka Panjang I), sehingga sudah sepantasnyalah bila pemerintah Orde Baru beserta birokratnya yang jujur memperoleh penghormatan berupa "Medali Pembangunan" dari masyarakat.

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Perkenankanlah saya mengakhiri pidato peresmian penerimaan jabatan saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan bersyukur kepada Allah yang maha pengasih lagi penyayang semoga saya beserta keluarga selalu memperoleh ridho dan rahmad-Nya.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Profesor dr. Bambang Rahino Setokusumo dan para Guru Besar atas kesediaan Saudara-saudara menerima saya dalam lingkungan Saudara yang terhormat.

Kepada Saudara Drs. Ec. B. Ekonomi Universitas Airlangga pengusulan saya sebagai Guru

Kepada Profesor Dr. H. Em. hingan yang diberikan k memperdalam ilmu ekonomi.

Saya sampaikan ucapan ter (almarhum), atas semua bant pahala di hari akhir nanti.

Kepada saudara Iwan Jaya D., M.A., Ph.D, saya ucapk kepada saya selama ini memperdalam ilmu ekonon

Kepada Bapak Fajar N pendiri Fakultas Ekonor belumlah saya masih tetap

Saya ucapkan terima kasi di Fakultas Ekonomi ma kerja sama baik dan bantu

Saya ucapkan terima kas mulai dari Sekolah Rak Atas di Madiun serta gu tidak lupa juga saya sar Caruban, Madiun. Semo kepada pada guru/ustad hari.

Baru telah berubah dari yang semula
"Balanced Budget" ataupun anggaran

inflasi yang semula tergolong dalam
"Creeping Inflation" yaitu suatu

pemerintah Orde Baru telah dapat
"Trap" /Perangkap penduduk yang

akumulasi pembentukan modal
h mencapai sekitar 28,0 % terhadap
ini merupakan hasil tersendiri yang
al/modal ataupun investasi tersebut
dalam pembangunan.

erintah Orde Baru telah berhasil
i dengan melampaui sekitar 20,0 %
Pelita ataupun dalam periode PJP I
udah sepantasnyalah bila pemimpin
memperoleh penghormatan berupa

an penerimaan jabatan saya sebagai
Pembangunan dengan bersyukur
ayang semoga saya beserta keluarga

tor Profesor dr. Bambang Rahino
in Saudara-saudara menerima saya

Kepada Saudara **Drs. Ec. Budiman Christiananta, MA, Ph.D.**, dekan Fakultas
Ekonomi Universitas Airlangga, saya sampaikan terima kasih atas persetujuan dan
pengusulan saya sebagai Guru Besar.

Kepada **Profesor Dr. H. Emil Salim** saya sampaikan banyak terima kasih atas bim-
bingan yang diberikan kepada saya selama ini terutama dalam hal untuk
memperdalam ilmu ekonomi.

Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada **Profesor Dr. Willem H. Makaliwe**
(almarhum), atas semua bantuannya selama ini, semoga amalan beliau dapat imbalan
pahala di hari akhir nanti.

Kepada saudara **Iwan Jaya Azis, M.Sc, Ph.D.** dan saudara **Winifred L.W. Subandi**
D., M.A., Ph.D., saya ucapkan terima kasih untuk bantuannya yang telah ddiberikan
kepada saya selama ini terutama dalam waktu mendampingi saya untuk
memperdalam ilmu ekonomi regional dan perbandingan sistim ekonomi.

Kepada **Bapak Fadjar Notonegoro**, yang merupakan sesepuh dan salah seorang
pendiri Fakultas Ekonomi, saya sampaikan terima kasih karena atas dorongan
beliaulah saya masih tetap bertahan di lingkungan almamater ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua kolega staf pengajar dan karyawan baik
di Fakultas Ekonomi maupun di Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga atas
kerja sama baik dan bantuannya pada saya selama ini.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru saya yang telah mendidik saya
mulai dari Sekolah Rakyat di Caruban, Sekolah Lanjutan Menengah Pertama dan
Atas di Madiun serta guru-guru saya di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan
tidak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih pada para guru ngaji saya di
Caruban, Madiun. Semoga atas semua amalan ilmu yang telah saya manfaatkan ini
kepada pada guru/ustadz akan diberikan pahala oleh Allah SWT di kelak kemudian
hari.

Kehadapan almarhum ayah kami Imam Zadjuli dan kehadapan almarhum dan almarhumah mertua kami H. Abdul Madjid kami doakan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa beliau dan dapat diterima di sisi-Nya

Kehadapan ayah dan ibu kami H. M. Anwar terima kasih kami ucapkan, semoga Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kedua beliau tersebut.

Kepada istri yang terkasih dan ketiga anak saya yang tercinta dengan ikhlas dan saya ucapkan terima kasih atas semua pengertian dalam berbagi rasa dan duka untuk membina kehidupan keluarga secara bersama.

Kepada kakak dan adik-adik serta seluruh keluarga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas semua kebaikannya terhadap diri saya selama ini.

Juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Panitia yang diketuai oleh Drs. E. H. Karjadi Mintaroem, M.S., seluruh Tim Paduan Suara, Direktur Airlangga University Press Drs. Yan Yan Cahyana, MA. beserta staf dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya upacara ini.

Saya sampaikan terima kasih pula kepada Bapak H. Muchlis Tamar beserta para anggota CPDS secara keseluruhan atas partisipasinya dalam acara ini.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah dengan sabar dan lapang hati mengikuti upacara ini hingga selesai.

Semoga Allah Yang Maha Esa dan Kuasa senantiasa selalu merakhmati kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukaan
Biro Pusat Statistik, Penderatan Regional P
_____, Penderatan Regional Prop
_____, Penderatan Regional Prop
_____, Penderatan Regional Prop
_____, Penderatan Nasional Indo
_____, Penderatan Nasional Indo
_____, Penderatan Nasional Indo
_____, Penderatan Nasional Indo
_____, Statistik Indonesia 196
_____, Statistik Indonesia 197
_____, Statistik Indonesia 197
_____, Statistik Indonesia 197
_____, Statistik Indonesia 197
_____, Statistik Indonesia 197
_____, Statistik 1976, Jak
_____, Statistik 1977, Jak
_____, Statistik 1980/198
_____, Statistik 1983, Jak
Chavery, Hollis & Syroqin Mose
1980
Departemen Penerangan Repub
1973/1974.
_____, Rencana Pempa

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Laporan Tahunan Pembukuan 1960-1963. Jakarta
- Biro Pusat Statistik, Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia Tahun 1969-1976. Jakarta, 1978
- , Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia Tahun 1975-1979. Jakarta, 1982
- , Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia Tahun 1976-1980. Jakarta, 1983
- , Pendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia Tahun 1977-1981. Jakarta, 1984
- , Pendapatan Nasional Indonesia 1978-1981. Jakarta, 1982
- , Pendapatan Nasional Indonesia 1979-1982. Jakarta, 1983
- , Pendapatan Nasional Indonesia 1980-1983. Jakarta, 1984
- , Pendapatan Nasional Indonesia 1983-1990. Jakarta, 1990
- , Statistik Indonesia 1968 & 1969. Jakarta, 1970
- , Statistik Indonesia 1970 & 1971. Jakarta, 1972
- , Statistik Indonesia 1972 / 1973. Jakarta, 1974
- , Statistik Indonesia 1973 / 1974. Jakarta, 1975
- , Statistik Indonesia 1974 / 1975. Jakarta, 1976
- , Statistik 1976. Jakarta, 1977
- , Statistik 1977. Jakarta, 1978
- , Statistik 1980/1981. Jakarta, 1982
- , Statistik 1983. Jakarta, 1984
- Chenery, Hollis & Syrquin Moises, Patterns of Development 1950-1970. New York : Oxford University Press, 1980
- Departemen Perencanaan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1969-1973/1974. Jakarta, 1969
- , Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama 1974/1975-1978/1979. Jakarta, 1974

Wabarakatuh.